

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2017-2022**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Salman Alfarizi

Nomor Mahasiswa : 17311245

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2022**

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 di Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Salman Alfarizi
Nomor Mahasiswa : 17311245
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Penulis,



Salman Alfarizi

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2017-2022**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

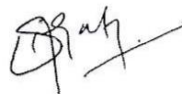
Nama : Salman Alfarizi

Nomor Mahasiswa : 17311245

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Agustus 2023

Dosen Pembimbing,



(Sri Mulyati, Dra., M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2017-2022**

Disusun Oleh : **SALMAN ALFARIZI**
Nomor Mahasiswa : **17311245**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

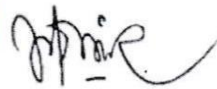
Pada hari, tanggal: **Senin, 11 September 2023**

Penguji/ Pembimbing TA : **Sri Mulyati, Dra., M.Si.**

Penguji : **Kartini, Dra., M.Si.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

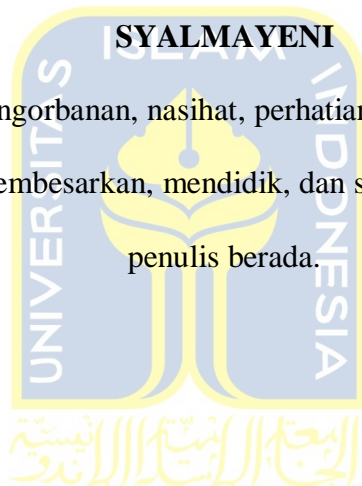
Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama:

RAJIMAN CH

Dan

SYALMAYENI

Atas segala upaya, pengorbanan, nasihat, perhatian serta kasih sayangnya yang tak terhingga dalam membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan di manapun penulis berada.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

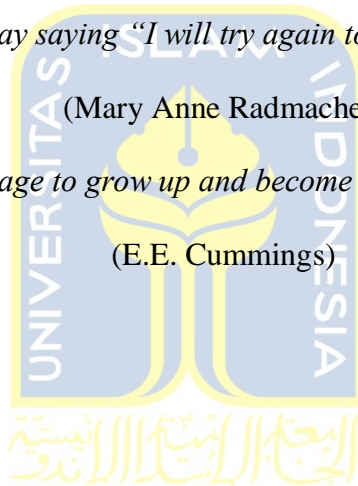
(Q.S At-Talaq: 4)

“Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying “I will try again tomorrow.””

(Mary Anne Radmacher)

“It takes courage to grow up and become who you really are.”

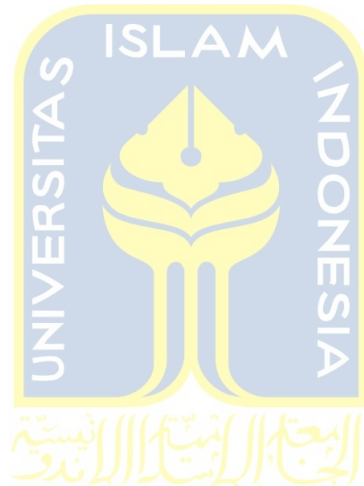
(E.E. Cummings)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Variabel independen yang diteliti antara lain ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage*. Sampel penelitian ini adalah 28 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, ukuran perusahaan, komite audit, *leverage*



ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of good corporate governance which proxied with firm size, audit committee, and leverage on tax avoidance. Tax avoidance is the dependent variable in this research. Tax avoidance is measured by effective tax rate (ETR). The independent variables in this research are firm size, audit committee, and leverage. The sample of this research is 28 banking companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2017-2022. The sample was selected using purposive sampling. The data analysis of this research is using classical assumption test and the hypothesis testing with double linear regression method. The result shows that firm size and leverage have significant positive effect on tax avoidance and audit committee has negative effect but insignificant on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, firm size, audit committee, leverage*



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahiraabil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Judul skripsi adalah **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022”**.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari arahan, dorongan, bantuan, doa serta bimbingan baik secara material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rajiman CH dan Ibu Syalmayeni selaku orangtua penulis yang telah memberikan pengorbanan, perhatian, dan doa yang tak terhingga.

2. Ayah Edi dan Bunda Dhea selaku *partner* hidup dari masing-masing orangtua penulis yang senantiasa selalu membantu dan memberikan dukungan.
3. Popy Syalman, Hafis Salman Fata, dan M. Rasya Al Mande selaku kakak dan adik-adik penulis yang selalu menemani dan memberikan nasehat dalam penulisan ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Arif Hartono, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Abdur Rafik, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Sri Mulyati, Dra., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan Ibu dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan Ibu.
9. Bapak Drs. Muhammad Bakr Muhlison, Dipl.Mgt. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat.

11. Seluruh karyawan dan staff tata usaha Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang telah turut andil dalam membantu segala kelancaran urusan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
12. Mbak Dita selaku teman yang telah membimbing penulis dalam pengolahan data dan memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan ini. *Thank you!*
13. Teman-teman semasa SMA, Dika, Firda, Puput, Windy yang telah menemani di dalam kehidupan penulis, menerima segala *sambatan* serta tempat untuk berbagi cerita, semoga apa yang di cita-citakan dapat tercapai. *Thank you! I miss you.*
14. Rekan-rekan Manajemen UII 2017 dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua khususnya bagi pembaca agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Penulis,

Salman Alfarizi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Landasan Hukum Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak	10
2.1.4 Perencanaan Pajak	11
2.1.5 Penghindaran Pajak.....	12
2.1.6 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.7 Tata Kelola Perusahaan	14
2.1.8 Asas Tata Kelola Perusahaan	15

2.1.9 Ruang Lingkup Tata Kelola Perusahaan di Bank Umum	17
2.1.10 Ukuran Perusahaan	18
2.1.11 Komite Audit	18
2.1.12 <i>Leverage</i>	19
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	28
2.4 Hipotesis Penelitian	28
2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	28
2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	30
2.4.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.1 Sumber Data	34
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	35
3.3.1 Variabel Dependen.....	35
3.3.2 Variabel Independen	35
3.4 Metode Analisis Data	37
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.4.2.1 Uji Normalitas	37
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas	37
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	38
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	38
3.4.3 Analisis Regresi Berganda	39
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	39
3.4.5 Uji Parsial (Uji t).....	40
3.4.6 Uji Pengaruh Simultan (Uji F).....	40

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	44
4.3.1 Uji Normalitas	44
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	45
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	47
4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	47
4.5 Hasil Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	49
4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	50
4.7 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F).....	51
4.8 Pembahasan.....	52
4.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	52
4.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	53
4.8.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
5.3 Implikasi Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

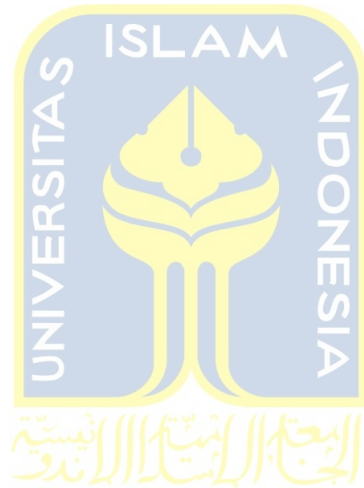
DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	34
Tabel 4.2	Hasil Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.3.1	Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.3.2	Hasil Uji Multikolinieritas	45
Tabel 4.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.3.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	47
Tabel 4.4	Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda	48
Tabel 4.5	Hasil Koefisien Determinasi.....	49
Tabel 4.6	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	50
Tabel 4.7	Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F).....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	28
------------	-------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel Perusahaan.....	62
Lampiran 2	Data Perhitungan Variabel Penghindaran Pajak.....	63
Lampiran 3	Data Perhitungan Variabel Ukuran Perusahaan.....	68
Lampiran 4	Data Perhitungan Variabel Komite Audit	73
Lampiran 5	Data Perhitungan Variabel <i>Leverage</i>	74
Lampiran 6	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	79
Lampiran 7	Hasil Uji Normalitas	80
Lampiran 8	Hasil Uji Multikolinearitas	81
Lampiran 9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
Lampiran 10	Hasil Uji Autokorelasi.....	83
Lampiran 11	Hasil Koefisien Determinasi.....	84
Lampiran 12	Hasil Uji t.....	85
Lampiran 13	Hasil Uji F.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hal yang mutlak bagi setiap bangsa untuk memerlukan pendapatan agar stabilitas ekonomi terjangkau dan masyarakat makmur dan sejahtera. Sektor perpajakan merupakan salah satu pendapatan yang menyumbang dana paling tinggi dan dapat membantu pembangunan nasional di Indonesia. Pendapatan dari sektor perpajakan di Indonesia mendapatkan persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Menurut Mustikasari (2007) terdapat persentase sebesar 80% dana APBN yang pendapatannya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, salah satu sumber penerimaan APBN yang paling penting adalah pajak. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terdapat di pasal 1 ayat 1 yang memiliki inti bahwa badan atau entitas adalah unsur wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar biaya pajak. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh entitas perusahaan jika memiliki wajib pajak dan membayarkannya kepada pemerintah.

Sikap patuh dari para unsur wajib pajak merupakan harapan dari setiap instansi pemerintah yang ada di setiap negara. Sikap dari para unsur wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak memiliki arti bahwa para unsur wajib pajak dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan kondisi

konkret atau nyata sehingga dapat menambah pemasukan negara. Pajak yang diterima dari unsur wajib pajak entitas adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) aktivitas penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu permasalahan untuk dapat memaksimalkan pendapatan pajak.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam aktivitas *tax avoidance* dilaksanakan oleh manajer dan penghindaran pajak dapat memperoleh keuntungan besar yang diharapkan oleh pemegang saham. Setiap pengeluaran dana dari perusahaan untuk pembayaran beban, salah satunya pajak merupakan salah satu hambatan yang dapat mengurangi keuntungan. Menurut Astuti dan Aryani (2017) pajak merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berakibatkan menyusutnya laba perusahaan, sehingga pembayaran pajak harus dapat seminimal mungkin. Bagi manajer, penghindaran pajak dapat membuka peluang untuk melakukan siasat dengan tujuan untuk mencari *profit* dalam tempo yang singkat, tetapi bukan dengan *profit* dalam tempo yang lama yang diharapkan oleh pemegang saham. Perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* dapat membantu dalam meringankan beban-beban dana yang akan dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

Kendati demikian, terdapat beberapa perusahaan industri perbankan di Indonesia yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan berita dari detikNews yang dirilis pada tanggal 9 November

2022, PT. Bank Pan Indonesia (PANIN) terjerat kasus suap pajak yang menyeret nama Veronika Lindawati selaku mantan kuasa pajak Bank Panin. Veronika didakwa telah melakukan suap pajak sebesar *Singapore Dollar* (S\$) 500 ribu yang dirupiahkan sebanding dengan 5,5 Miliar rupiah yang diberikan terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Angin Prayitno dan para bawahannya. Tujuan dari penyuapan ini adalah untuk merekayasa hasil perhitungan pajak PT. Bank Panin untuk wajib pajak tahun 2016.

Selain itu, berdasarkan berita dari DDTCNews yang dirilis pada tanggal 2 November 2020, laporan praktik pengalihan laba yang dirilis oleh *Transparency International* Uni Eropa dilakukan dalam skala yang besar oleh bank-bank di Benua Eropa ke yurisdiksi *heaven tax* yang dapat ditaksir sebesar €4,5 miliar atau dirupiahkan sebesar Rp.76,8 triliun.

Menurut analisis kebijakan dari *Transparency International* Uni Eropa, yaitu Elana Gaita, menyebutkan bahwa nilai pengalihan laba yang dilakukan oleh bank-bank di Benua Eropa ke yurisdiksi berlaku pada periode 2015 sampai dengan 2019 yang tujuannya adalah untuk mendapatkan biaya pajak yang rendah atau tidak ada pungutan pajak sama sekali. Menurutnya, hal itu adalah tindakan *ghost operation* yang dilakukan bank untuk mengalihkan laba perusahaan agar dapat meminimalisir kewajiban dalam pembayaran pajak.

Terdapat faktor-faktor yang dapat terjadi dalam tindakan penghindaran pajak dan ukuran perusahaan merupakan salah satunya.

Ukuran perusahaan merupakan rasio yang diukur berdasarkan dengan pendapatan entitas dan kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan memiliki skala yang besar, maka perusahaan tersebut cenderung memiliki manajemen baik serta sumber laba yang lebih baik untuk menjalankan operasional. Perusahaan yang memiliki laba besar mempunyai arti kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* meningkat karena jumlah pajak penghasilan bertambah yang tercermin dari pertambahan keuntungan perusahaan.

Selain ukuran perusahaan, terdapat faktor lainnya yaitu komite audit. Menurut Pohan (2008) apabila total *audit committee* di suatu perusahaan tidak mengikuti pedoman yang diberikan oleh BEI yaitu perusahaan mensyaratkan anggota komite audit setidaknya 3 orang dapat berakibatkan bertambahnya lini manajemen pada upaya tindakan meminimalisasi keuntungan untuk kepentingan pajak.

Leverage merupakan salah satu faktor dari tindakan penghindaran pajak. *Leverage* merujuk pada rasio yang menunjukkan besarnya modal dari luar yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam upaya kegiatan aktivitas operasionalnya. Menurut Brigham dan Houston (2010) sebuah entitas yang mempunyai dana dari pinjaman luar yang besar, maka entitas tersebut harus melunasi biaya bunga yang tinggi terhadap kreditur. Biaya bunga dapat memangkas keuntungan dan akibat dari pengurangan laba tersebut dapat mengecilkan biaya pajak terhadap 1 periode yang berlangsung. Oleh karena itu, perusahaan dengan menggunakan siasat *leverage* mampu meringkas

pajak yang terutang, sehingga kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan menggunakan ukuran perusahaan, komite audit dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) dengan tujuan untuk menguji secara empiris apakah *corporate governance* memiliki beberapa dampak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan pernyataan yang sudah dijelaskan secara dasar penulis meneliti skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjelasan terkait rumusan masalah lantas sasaran dilakukannya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil terhadap dilakukannya skripsi ini, yaitu:

1) Kontribusi Teoritis

Penelitian ini menambah pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik dalam penghindaran pajak. Informasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perspektif dalam menilai tata kelola perusahaan yang baik.

2) Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis untuk pengambilan keputusan manajerial mengenai penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan yang baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang mendorong dilakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penulisan diuraikan dalam bab ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bagian bab kajian pustaka berisi penggambaran spekulasi yang terkait dengan tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, *leverage* dan penghindaran pajak. Selain itu, terdapat juga tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan gambar kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang *instrument* pada penelitian ini berupa objek penelitian yang akan dikaji, definisi operasional tiap variabel, jenis dan bagaimana teknik pengumpulan data serta metode yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari analisis data berupa statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis. Pembahasan dari hasil analisis data juga terdapat pada bab ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran bagi para peneliti berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Andriani merupakan pembayaran terhadap negara serta dapat dipaksakan oleh yang terutang dan wajib untuk dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dengan kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terdapat di pasal 1 ayat 1 mengemukakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh seorang individu atau entitas yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak oleh para ahli maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian pajak bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang harus dibayarkan kepada Negara dengan

bersifat memaksa dan imbalan yang diterima tidak secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat serta dana tersebut digunakan untuk kepentingan Negara.

2.1.2 Landasan Hukum Pajak

Pajak di Indonesia memiliki dasar hukum yang berlaku setelah era kemerdekaan. Dasar hukum yang melandasi perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

- a. UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan
- c. UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
- d. UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa
- e. UU No. 14/2002 mengatur Pengadilan Pajak

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak yang diterapkan oleh setiap Negara pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Fungsi perpajakan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Fungsi Budgetair atau bisa disebut dengan fungsi fiskal merupakan fungsi utama pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara ideal ke dalam kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dana yang digunakan untuk membiayai segala

kepentingan pemungutan pajak dari penduduknya dibutuhkan oleh pemerintah.

- b. Fungsi Regulerend atau bisa disebut dengan fungsi mengatur merupakan fungsi pajak sebagai media untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi regulerend bisa disebut dengan fungsi tambahan karena fungsi ini dijadikan sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu fungsi budgetair.

2.1.4 Perencanaan Pajak

Setiap kegiatan yang berkaitan tentang pembayaran pajak tentu bukan hal yang menyenangkan bagi perusahaan sehingga timbul sebuah aktivitas yang dinamakan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* merupakan salah satu dari bagian manajemen perpajakan yang komprehensif dan langkah pertama untuk menganalisis berbagai macam alternatif dari perpajakan yang secara sistematis agar mendapatkan biaya pajak yang rendah.

Terdapat berbagai macam perencanaan pajak sebagai berikut:

- a. *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan alat penghematan pajak dengan mentransfer sumber daya dari pemerintah ke pemegang saham yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan sesudah pajak (Wang, 2010).
- b. *Tax Evasion* atau penggelapan pajak merupakan usaha untuk menangkai dari kewajiban yang sesungguhnya oleh unsur wajib pajak dan

perbuatan tersebut dapat menyalahi undang-undang perpajakan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

- c. *Tax Saving* atau penghematan pajak merupakan usaha untuk mengalihkan sumber daya kepada para pemegang saham yang seharusnya ditujukan untuk Negara alih-alih untuk meningkatkan nilai sesudah pajak perusahaan (Wang, 2010).

2.1.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak yang tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya kewajiban pajak. Menurut Wang (2010) penghindaran pajak merupakan alat penghemat pajak dengan mentransfer sumber daya dari pemerintah ke pemegang saham yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan sesudah pajak. Pada dasarnya, praktik penghindaran pajak tidak dilarang secara hukum pajak akan tetapi bermakna negatif bagi kantor pajak. Menurut Mardiasmo (2009) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Menurut Merks (2007) penghindaran pajak bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.1.6 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi mengartikan tentang bagaimana perilaku suatu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu perusahaan. Menurut Anand (2007:83) konsep teori agensi berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang merujuk pada praktik hubungan antara *principal* dan *agent*. Konteksnya adalah pemangku kepentingan menyalurkan dana untuk menggerakkan perusahaan sebagai *principal* dan manajer yang mengelola perusahaan serta melaporkan hasil kerjanya kepada pemegang saham sebagai *agent*. Teori keagenan akan berlaku ketika terjadi hubungan kontrak antara beberapa orang (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa. Prinsipal melimpahkan tugas tersebut kepada *agent* guna memberikan laporan keadaan perusahaan secara aktual atau kenyataannya. Informasi tentang keadaan perusahaan digunakan untuk memperhatikan kinerja *agent* dan mencermati apakah modal sudah berjalan sesuai dengan semestinya.

Pemberian kewenangan tersebut dapat menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Hal ini karena agen sebagai pengambil keputusan dalam

perusahaan tersebut pastinya memiliki kepentingan pribadi sendiri. Prinsipal sebagai pemberi dana menginginkan agen untuk bekerja dalam memaksimalkan kemakmuran prinsipal, sedangkan agen ingin mewujudkan kemakmuran dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu pengawasan terhadap pelaksanaan didalam perusahaan.

2.1.7 Tata Kelola Perusahaan

Menurut Anand (2007) tata kelola perusahaan merupakan suatu prinsip yang mendasari dewan direksi untuk secara efektif mengawasi dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pada tata kelola perusahaan tentunya berisi tentang struktur dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan yang besar dalam jangka panjang.

Berdasarkan Januarita (2006) dalam Komite Nasional Kebijakan Governance menjelaskan tata kelola perusahaan merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, yang mana berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Berdasarkan *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Berdasarkan pengertian tata kelola perusahaan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu prinsip penting yang harus ada di sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku disuatu negara serta dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

2.1.8 Asas Tata Kelola Perusahaan

Pada setiap perusahaan tentu mereka harus memastikan bahwa asas tata kelola perusahaan sudah ditetapkan pada setiap aspek-aspek perusahaan. Adapun asas tata kelola perusahaan yang dijelaskan Januarita (2006:5) dalam Komite Nasional Kebijakan Governance tentang Pedoman Umum Good Corporate antara lain:

- **Transparansi (*Transparency*)**

Perusahaan dalam tujuannya untuk menggerakkan bisnis perlu memberikan informasi secara krusial kepada pemangku kepentingan dengan metode yang dapat . Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

- *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

- *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat asas tata kelola perusahaan yang lainnya (Anand, 2007:88) sebagai berikut:

- *Reputation (Reputasi)*

Perusahaan yang bekerja untuk membangun reputasi sebagai praktik tata kelola perusahaan yang baik memiliki manfaat yaitu meningkatkan

loyalitas dan kepercayaan dari pemegang saham. Hal ini dimaksudkan untuk berfokus pada membangun hubungan yang kuat.

2.1.9 Ruang Lingkup Tata Kelola Perusahaan di Bank Umum

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum. Tujuan diterbitkannya PBI ini adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*ethics value*) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diwujudkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

- Rencana strategis bank.
- Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Brigham & Houston (2010:4) menjelaskan ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas.

Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

2.1.11 Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2009:48) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan

keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Menurut Tandean dan Winnie (2016) perusahaan terbuka wajib memiliki komite audit yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Prinsip dasar dari komite audit adalah dewan membentuk komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota atau pada perusahaan kecil terdapat dua anggota yang semuanya independen dan bukan dewan direksi.

2.1.12 Leverage

Husnan (2002) dalam Handayani (2018) menjelaskan *leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam penggunaan utang.

Menurut Sonia dan Suparmun (2019) *leverage* merupakan tingkat hutang dalam perusahaan terkait dengan kebijakan pembiayaan perusahaan. *Leverage* dihitung dengan membandingkan jumlah hutang dengan jumlah ekuitas yang dipegang oleh perusahaan

Menurut Alkhatib (2012) perusahaan yang melakukan peminjaman dalam jumlah besar pada saat bisnis mengalami resesi memiliki kemungkinan untuk gagal dalam membayar hutang setelah jatuh tempo sehingga mengakibatkan tingkat *leverage* yang tinggi dan berujung pada resiko bisnis yang bangkrut.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini melibatkan pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan penelitian yang sejenis dan bisa mendukung landasan teori.

Ridho (2016) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel yang dipakai pada penelitiannya merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2014 dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 37 perusahaan. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Fadhilah (2014) menganalisis secara empiris pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai dengan 2011. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 131 perusahaan. Uji hipotesis menggunakan model regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa

komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Honggo & Marlinah (2019) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, *sales growth*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 60 perusahaan. Uji hipotesis menggunakan analisis berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Swingly & Sukartha (2015) menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas dengan total jumlah populasi sebanyak 131 perusahaan. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, *leverage*, dan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Widyaningsih, Harimurti, & Widarno (2018) menganalisis tentang pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit dan *leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Handayani (2018) meneliti tentang pengaruh *return on assets* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan mengikuti kriteria. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *return on assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) menganalisis tentang pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Sampel yang dipakai adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Berlandaskan hasil analisis menyatakan komite audit serta kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rosyada (2018) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sampel yang dipakai adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan mengikuti kriteria. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Fatimah (2018) menganalisis tentang pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitiannya adalah perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive*

sampling. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Ridho (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2014	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Sales Growth</i>	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Fadhilah (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit	Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak

		Di BEI 2009-2011)		berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Honggo & Marlinah (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> , Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> , <i>Leverage</i>	Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	Swingly & Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i>	Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, <i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5	Widyaningsih, Harimurti, & Widarno (2018)	Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6	Handayani (2018)	Pengaruh <i>Return on Assets</i> (ROA), <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: <i>Return on Assets</i> (ROA), <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan	<i>Return on Assets</i> (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Cahyono, Andini, & Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i> (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak

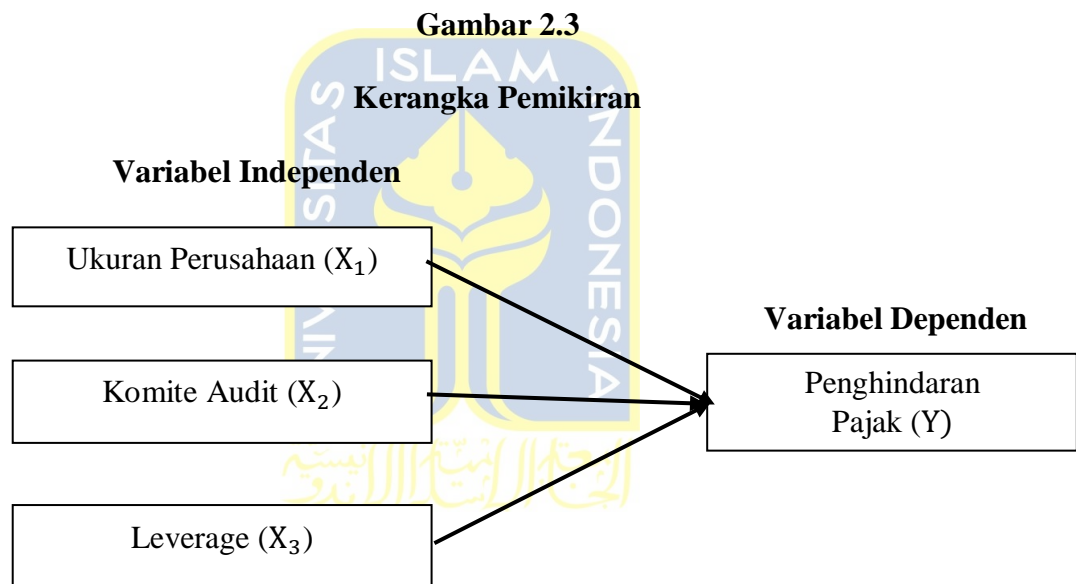
		Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013		berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8	Rosyada (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Profitabilitas	<i>Leverage</i> dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	Fatimah (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan	Komite audit, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan

				terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--	------------------------------

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berlandaskan paparan pada kajian pustaka yang sudah diulas, maka ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* merupakan variable independen dan penghindaran pajak merupakan variable dependen.

Gambaran daripada kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menjelaskan bahwasanya ukuran perusahaan merupakan skala sebagai pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai aspek, yaitu total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large*

firm), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Berlandaskan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 menetapkan bahwa tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas diturunkan dari 22% menjadi 19% berlaku per tahun 2020 dan 2022. Perusahaan dengan pendapatan kotor lebih dari 4,8 milyar rupiah per tahun (termasuk perusahaan besar) akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 19%. Sedangkan untuk perusahaan dengan pendapatan kotor sampai dengan 4,8 milyar rupiah per tahun (termasuk perusahaan menengah dan kecil) diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan final dengan tarif 1% dari pendapatan kotor perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan dalam penentuan tarif pajak antara perusahaan besar dan kecil. Perusahaan dapat dinilai berlandaskan salah satunya total aktiva. Yaitu semakin besar total aktiva yang dimiliki maka perusahaan akan meningkatkan aktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar akan berdampak pada laba dan biaya pajak yang menjadi tinggi, sehingga perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak untuk meminimalisir biaya pajak. Kesimpulannya ukuran perusahaan yang semakin besar dapat meningkatkan kegiatan pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ridho (2016)

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Honggo & Marlinah (2019) juga menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rachmitasari (2015) komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Komite audit adalah salah satu komponen manajer yang mengambil peran pada kebijakan perusahaan dan bertindak untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang banyak membuat pengawasan terhadap pengendalian pengelolaan keuangan menjadi ketat sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen menjadi berkurang. Apabila perusahaan memiliki anggota komite audit yang sedikit membuat pengawasan terhadap

pengendalian pengelolaan keuangan menjadi terbatas sehingga tindakan pajak agresif yang dilakukan pihak manajemen menjadi meningkat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga terdapat hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ridho (2016) adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan.

Perusahaan semakin bertumpu pada dana hutang untuk pembiayaan aset perusahaan ketika rasio *leveragenya* tinggi. Perusahaan yang memiliki banyak hutang akan berdampak pada biaya bunga yang besar dan dapat mempengaruhi penurunan total biaya pajak perusahaan. Perusahaan memanfaatkan keadaan tersebut untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Kesimpulannya rasio *leverage* yang tinggi dapat meningkatkan kegiatan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ridho (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini

diduga terdapat hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian menggunakan populasi dari keseluruhan perusahaan perbankan *listed* dalam Bursa Efek Indonesia. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan perbankan dengan laba sebelum pajak lebih besar dari beban pajak yang ditanggung serta tidak mengalami rugi. Periode pengamatan yang dilakukan adalah pada 2017-2022. Teknik pengumpulan data yang diterapkan menggunakan cara *purposive sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria spesifik untuk menyeleksi sampel penelitian. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyeleksi perusahaan sampel antara lain:

1. Perusahaan perbankan *listed* di *Indonesia Stock Exchange*.
2. Perusahaan perbankan menyediakan *annual report* selama tahun 2017-2022.
3. Pada tahun 2017-2022, perusahaan perbankan tidak menghadapi rugi.

Tabel 3.1

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Pelanggaran	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan <i>listed</i> di <i>Indonesia Stock Exchange</i>		47
2.	Perusahaan perbankan menyediakan <i>annual report</i> selama tahun 2017-2022	(2)	45
3.	Pada tahun 2017-2022, perusahaan perbankan yang menghadapi rugi	(17)	28
Perusahaan yang lolos kriteria		28	
Periode penelitian		6	
Jumlah sampel yang digunakan (28x6)		168	

Sumber: Data diolah. 2023

Dari kriteria di atas diperoleh perusahaan yang lolos kriteria sebanyak 28. Dengan demikian, total sampel pada penelitian ini berjumlah 168 (28x6).

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Penelitian ini mengaplikasikan sumber data sekunder dengan menyajikan *annual report* perusahaan perbankan tahun 2017-2022. Pencarian data dapat diperoleh dari situs www.idx.co.id dan laman website pada perusahaan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

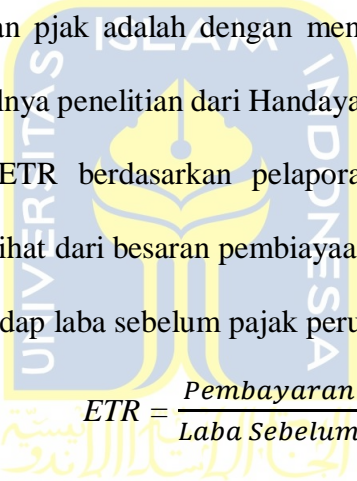
Penelitian ini mengaplikasikan metode dalam pengumpulan data melalui pengumpulan arsip *annual report* perusahaan perbankan tahun 2017-2022.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan sebab dari adanya variabel independen. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen pada penelitian ini.

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk dapat mengurangi biaya pajak dengan begitu perusahaan dapat mengalokasikan dana terhadap berlangsungnya operasional. Pengukuran dari penghindaran pajak adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) seperti halnya penelitian dari Handayani (2018). Menurut Astuti dan Aryani (2017) ETR berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. ETR dilihat dari besaran pembiayaan pajak pada laporan laba rugi perusahaan terhadap laba sebelum pajak perusahaan.


$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan pemberi dampak bagi variabel dependen. Ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* merupakan variabel independen pada penelitian ini.

1) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan penilaian organisasi dengan melihat seberapa besar harta perusahaan. Besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset baik itu *tangible* maupun *intangible*, total tenaga kerja, total penjualan dan lain-lain. Menurut Ridho (2016) dalam

Guire et al. (2011) ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *Natural logarithm total asset* yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (Total Aset)$$

2) Komite Audit

Komite Audit adalah kelompok anggota yang mengawasi audit eksternal perusahaan agar tidak melakukan suatu kecurangan. Menurut Honggo dan Marlinah (2019) dalam Mahanani et al. (2017) komite audit dapat diukur dengan menghitung jumlah komite audit yang terdapat di sebuah perusahaan yang terdaftar di BEI. Komite audit diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{anggota komite audit perusahaan}$$

3) Leverage

Leverage adalah rasio yang dapat mengukur kesanggupan perusahaan untuk menggunakan aset ketika mempunyai hutang tempo panjang dan hutang tempo pendek. Menurut Honggo dan Marlinah (2019) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) *leverage* diukur dengan menggunakan *debt to total asset ratio* (DAR) karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total hutang. *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva Perusahaan}}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif menyatakan gambaran terhadap data melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan tentang variabel-variabel yang diterapkan pada penelitian supaya dapat dipahami.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bermaksud untuk memahami data-data yang diterapkan sudah lolos atau tidak dan dapat diujikan terhadap beberapa asumsi-asumsi dasar. Uji asumsi klasik memiliki beberapa pengujian, diantaranya:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas berniat untuk menguji model regresi dan variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Variabel yang tidak terdistribusi secara normal dapat menyebabkan uji statistik menghadapi penurunan. Penelitian ini mengaplikasikan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk uji normalitas. Dasar penentuan data terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Data tidak terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel-variabel independen. Cara mendeteksi keberadaan multikolinieritas di penelitian ini adalah dengan mengacu pada nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factors* (VIF). Skala ini dapat menggambarkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah nilai *tolerance* $< 0,1$ atau $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai *tolerance* $> 0,1$ atau $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan varians pada residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Penelitian ini mengaplikasikan uji Glejser untuk uji heteroskedastisitas. Tata cara pada pengujian ini adalah meregresikan variabel independen terhadap *absolute residual* (Abs_RES). Dasar penentuan data tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig. $> 0,05$. Data terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig. $< 0,05$.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan pada penelitian dengan data *time series* atau rentang waktu. Uji ini bertujuan apakah terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Penelitian ini mengaplikasikan uji *Durbin-Watson* untuk uji autokorelasi. Dasar penentuan model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai *Durbin-Watson* (d) $>$ nilai (du) dan nilai *Durbin-Watson* (d) $<$ nilai ($4-du$).

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah terdapat pengaruh antara variable independen dan variable dependen, sehingga dapat menciptakan perkiraan rata-rata dan nilai variable dependen yang berasalkan dari nilai variable independen.

Model pengujian pada penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

α : Konstanta

β_{1-3} : Koefisien regresi

X_1 : Ukuran Perusahaan

X_2 : Komite Audit

X_3 : *Leverage*

e : Standar *error*.

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) mendasari tentang seberapa pengaruh kemampuan model dalam menguraikan variasi dari variable dependen. Menurut Ghazali (2018) kemampuan variable-variable independen untuk menguraikan variable independen sangat terbatas jika nilai *Adjusted R^2* kecil.

3.4.5 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) tujuan dari uji statistik t adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variable independen dalam menguraikan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, pengujian statistik t untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil ketetapan tentang diterima atau ditolaknya H_0 berlandaskan pada hasil nilai uji statistik yang menerangkan jika ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* akan memiliki pengaruh ataukah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dasar penentuan variable independen secara parsial berpengaruh terhadap variable dependen apabila nilai sig. $t < 0,05$. Variable independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variable dependen ketika nilai sig. $t > 0,05$.

3.4.6 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018) uji statistik F adalah uji yang digunakan untuk menyatakan apakah keseluruhan variable independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependen. Pada penelitian ini, pengujian statistik F untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil ketetapan tentang diterimanya hipotesis jika nilai sig. $F < 0,05$. Tidak diterimanya hipotesis ketika nilai sig. $F > 0,05$.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tahapan dan olah data kemudian dianalisis tentang “pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak”. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data didapat dari orang kedua, ketiga, dan sebagainya. Data sekunder juga bisa berupa data-data yang dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia dan laman website perusahaan sepanjang periode 2017-2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan sampel yang tidak sesuai tidak dimasukkan dalam penelitian. Sampel yang sudah selesai diseleksi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan adalah sebanyak 28 sampel perusahaan yang lolos terhadap kriteria. Penelitian ini memiliki total sampel 168 yang diperoleh dari banyak sampel perusahaan dikali dengan jangka waktu periode penelitian.

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab mengenai “pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak” adalah analisis statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji partial (Uji t) dan, uji pengaruh simutan (Uji F).

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data pada seluruh variable penelitian (variable independen dan variable dependen). Penghindaran pajak merupakan variable dependen pada penelitian ini dan ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* merupakan variable independen. Pada tabel 4.2 merupakan hasil dari analisis deskriptif penelitian, yaitu:

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan (X1)	168	27.3931	35.2282	31.9150	1.8104
Komite Audit (X2)	168	2	8	3.92	1.209
Leverage (X3)	168	.0749	.9414	.7922	.1457
Penghindaran Pajak (Y)	168	.0122	.5533	.2521	.0623

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Variable ukuran perusahaan mendapatkan nilai minimum sebesar 27,3931 yang diperoleh Bank Krom Bank Indonesia Tbk pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 35,2282 yang diperoleh Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 31,9150 artinya perusahaan sampel mempunyai ukuran perusahaan yang besar. Standar deviasi ukuran perusahaan

sebesar 1,8104 menunjukkan bahwa persebaran data sampel sebesar 1,8104 dari rata-ratanya.

2. Variable komite audit mendapatkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 8. Nilai rata-rata komite audit sebesar 3,92 artinya perusahaan sampel memiliki komite audit yang berjumlah antara 3 sampai dengan 4 orang untuk setiap perusahaannya, sesuai dengan prinsip dasar komite audit yaitu sekurang-kurangnya 3 orang dan standar deviasi sebesar 1,209 menunjukkan bahwa persebaran data sampel sebesar 1,209 dari rata-ratanya.
3. Variable *leverage* mendapatkan nilai minimum sebesar 0,0749 yang diperoleh Bank Krom Bank Indonesia Tbk pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,9414 yang diperoleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,7922 artinya perusahaan sampel dalam memenuhi kewajibannya untuk membiayai aktifitas perusahaan sebesar 79,22%. Semakin tinggi rasio DAR, maka semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Standar deviasi *leverage* sebesar 0,1457 menunjukkan bahwa persebaran data sampel sebesar 0,1457 dari rata-ratanya.
4. Variable penghindaran pajak mendapatkan nilai minimum sebesar 0,0122 yang diperoleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,5533 diperoleh Bank

Permata Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,2521 artinya menunjukkan bahwa rata-rata besarnya pembayaran pajak perusahaan sampel dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar 25,21% dari nilai laba sebelum pajak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan sampel sangat tinggi. Perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi dapat menyebabkan Negara menjadi rugi karena dana yang diterima dari sektor pajak mengalami pengurangan. Standar deviasi penghindaran pajak adalah sebesar 0,0623 yang artinya persebaran data sampel sebesar 0,0623 dari rata-ratanya.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berkaitan tentang apakah keadaan suatu data sudah melengkapi dari asumsi dasar. Terdapat beragam macam uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk memverifikasi model regresi dan residual sudah terdistribusi normal atau tidak. Metode uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi data sudah terdistribusi normal atau tidak. Dasar penentuan data terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov terdapat pada tabel 4.3.1 sebagai berikut:

Tabel 4.3.1

Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.253

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.3.1 diketahui bahwa hasil uji normalitas 0,253 > 0,05 artinya data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage*. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah nilai *tolerance* < 0,1 dan batas VIF >10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.3.2 sebagai berikut:

Tabel 4.3.2

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ukuran Perusahaan (X1)	.958	1.044	Tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit (X2)	.984	1.016	Tidak terjadi multikolinieritas
Leverage (X3)	.960	1.041	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.3.2 diketahui hasil uji multikolinieritas bahwa semua variable independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 yaitu variabel ukuran perusahaan (0,958), komite audit (0,984), dan *leverage* (0,960). Variable independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu variabel

ukuran perusahaan (1.044), komite audit (1.016), dan *leverage* (1.041). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data bebas terhadap multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini mengaplikasikan uji Glejser untuk uji heteroskedastisitas dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai *absolute residual* (Abs_RES). Dasar penentuan data tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig. > 0,05. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.3.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	batas	Keterangan
Ukuran Perusahaan (X1)	.122	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit (X2)	.376	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Leverage (X3)	.573	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.3.3 diketahui hasil uji heteroskedastisitas bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 yaitu variable ukuran perusahaan (0,122), komite audit (0,376) dan *leverage* (0,573). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data bebas dari heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan pada penelitian dengan data *time series* atau rentang waktu. Tujuannya adalah menguji apakah model regresi terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t terhadap kesalahan periode sebelumnya ($t-1$). Penelitian ini mengaplikasikan uji *Durbin-Watson* untuk uji autokorelasi. Dasar penentuan model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai *Durbin-Watson* (d) $>$ nilai (d_u) dan nilai *Durbin-Watson* (d) $<$ nilai ($4-d_u$). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.3.4 sebagai berikut:

Tabel 4.3.4
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	d_u	$4-d_u$	Keterangan
1.910	1.784	2.216	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.3.4 diketahui hasil uji autokorelasi bahwa nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1,910. Dengan jumlah sampel adalah 168 diketahui nilai (d_u) adalah 1,784 sehingga dapat dijelaskan bahwa $d_u < d < (4-d_u) = 1,784 < 1,910 < (4-1,784) = 1,784 < 1,910 < 2,216$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data bebas dari autokorelasi.

4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan sebagai pengukur besarnya pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil regresi linier berganda terdapat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-14.898	.742
Ukuran Perusahaan (X1)	3.961	.210
Komite Audit (X2)	-.062	.087
Leverage (X3)	.307	.094

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.4 menunjukkan bahwa model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -14,898 + 3,961X_1 - 0,062X_2 + 0,307X_3 + e$$

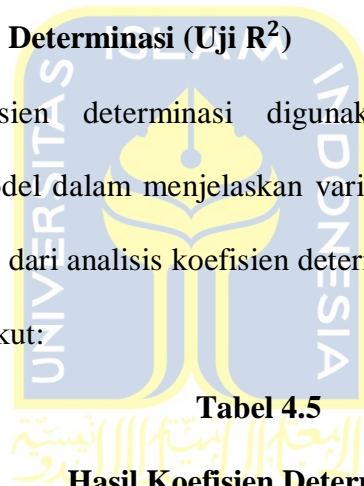
Kesimpulan yang berlandaskan pada hasil persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

- Nilai *intercept* konstanta sebesar -14,898. Hasil ini menunjukkan jika nilai ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* sebesar 0, maka besarnya tindakan penghindaran pajak sebesar -14,898 atau negatif. Hal ini mengartikan bahwa jika tidak ada ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage*, maka tidak terjadi penghindaran pajak.
- Nilai koefisien regresi variable ukuran perusahaan sebesar 3,961. Hasil menunjukkan apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 3,961 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

- c. Nilai koefisien regresi variable komite audit sebesar -0,062. Hasil ini menunjukkan apabila komite audit meningkat sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar -0,062 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variable *leverage* sebesar 0,307. Hasil ini menunjukkan apabila *leverage* meningkat sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,307 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

4.5 Hasil Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Hasil dari analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:



Tabel 4.5
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.710	.705	.60888

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.5 hasil *Adjusted R Square* = 0,705 yang memiliki makna bahwa variabel ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* secara bersama-sama mempengaruhi variabel penghindaran pajak sebesar 70,5%, dan sisanya didorong oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian yaitu 29,5%.

4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji t

Model		t hitung	Sig. t
1	(Constant)	-20.087	.000
	Ukuran Perusahaan (X1)	18.824	.000
	Komite Audit (X2)	-.717	.475
	Leverage (X3)	3.274	.001

Sumber: Data sekunder. 2023

- a. Hipotesis 1: Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Berlandaskan tabel 4.6 diketahui nilai t-hitung sebesar 18,824 dan nilai signifikansi t 0,000 ($p < 0,05$), ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak artinya variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H_1 diterima atau didukung.

- b. Hipotesis 2: Pengujian Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

Berlandaskan tabel 4.6 diketahui nilai t-hitung sebesar -0,717 dan nilai signifikansi t 0,475 ($p > 0,05$), ini menunjukkan bahwa H_0 diterima

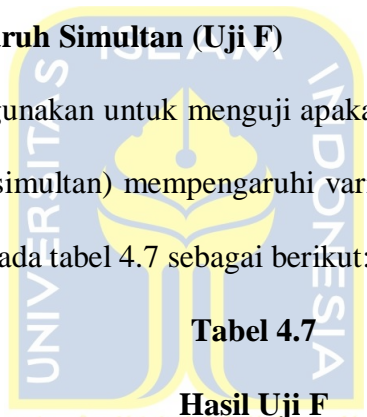
artinya komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H2 ditolak atau tidak didukung.

c. Hipotesis 3: Pengujian Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

Berlandaskan tabel 4.6 diketahui nilai t-hitung sebesar 3,274 dan nilai signifikansi t 0,001 ($p < 0,05$), ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak artinya *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H3 diterima atau didukung.

4.7 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:



Tabel 4.7

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.111	3	49.704	134.068	.000 ^b
	Residual	60.801	164	.371		
	Total	209.912	167			

Sumber: Data sekunder. 2023

Berlandaskan tabel 4.7 hasil uji F diperoleh F-hitung sebesar 134.068 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikan $0,000 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa

ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berlandaskan keputusan hipotesis pertama adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perkara ini mengindikasikan ukuran perusahaan yang semakin besar, maka semakin besar juga kegiatan penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Swingly dan Sukartha (2015) sejalan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Handayani (2018) tidak sejalan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar identik dengan besarnya total aktiva sehingga dapat meningkatkan aktivitas perusahaan. Dengan meningkatnya aktivitas perusahaan maka beban pajak perusahaan juga semakin meningkat yang mengakibatkan perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hal tersebut yang menggerakkan pihak manajemen untuk memanfaatkan beban pajak dari total aset yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga pajak yang terutang semakin kecil.

4.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berlandaskan keputusan hipotesis kedua adalah komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan banyak atau sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena bisa saja pemicunya adalah komite audit tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan besaran *tax fee* yang harus dilunasi perusahaan. Selanjutnya, akibat dari adanya peraturan dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan memiliki komite audit hanya dijadikan sebagai formalitas sehingga perusahaan tidak memperhatikan kinerja dari komite audit.

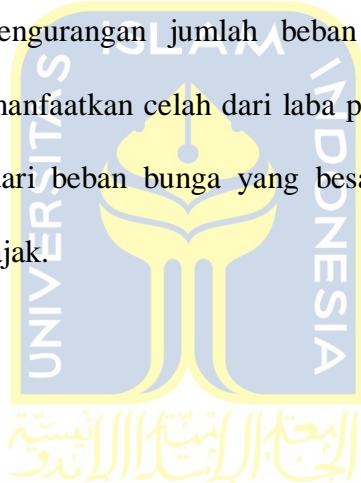
Hasil penelitian dari Fatimah (2018) tidak sejalan bahwasanya komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Widyaningsih, Harimurti, & Widarno (2018) dan Handayani (2018) sejalan bahwasanya komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak.

4.8.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berlandaskan keputusan hipotesis ketiga adalah *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwasanya semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Rosyada (2018) sejalan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian

dari Fatimah (2018) dan Handayani (2018) tidak sejalan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage yang besar menimbulkan tingginya pembiayaan aset perusahaan sehingga perusahaan bergantung pada utang. Rasio *leverage* perusahaan yang besar mengartikan besarnya utang berakibat biaya bunga yang timbul juga semakin besar. Beban bunga yang besar dapat berpengaruh pada berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Perusahaan menggunakan manfaat dari beban bunga yang besar untuk mendapatkan insentif dari pengurangan jumlah beban pajak perusahaan sehingga perusahaan memanfaatkan celah dari laba perusahaan yang semakin kecil karena akibat dari beban bunga yang besar untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berlandaskan pada hasil analisis data tentang pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak antara lain:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan ukuran perusahaan yang semakin besar menandakan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan semakin tinggi.
2. Komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan total anggota komite audit di suatu perusahaan tidak menjerumuskan perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Komite audit diadakan hanya dijadikan sebagai formalitas agar mentaati regulasi yang berlaku oleh pemerintah.
3. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan rasio *leverage* yang semakin besar menandakan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan semakin tinggi. Dengan memanfaatkan utang untuk meningkatkan beban bunga sehingga total beban pajak menjadi berkurang dan perusahaan mendapat celah untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

5.2 Saran

Berlandaskan dari hasil analisis penelitian, penulis mengajukan nasihat bagi penelitian selanjutnya dengan model serupa sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan tahun observasi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memangkas kriteria dalam pemilihan sampel perusahaan, sehingga sampel perusahaan menjadi banyak dan penelitian akan menghasilkan hasil yang lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen karakteristik dari tata kelola perusahaan yang lainnya seperti kualitas audit, dewan komisaris independent, kepemilikan institusional, dan variabel lainnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap penghindaran pajak.

5.3 Implikasi Penelitian

Berlandaskan dari kesimpulan, implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para peneliti, khususnya dalam penelitian yang berkaitan tentang penghindaran pajak.
2. Bagi penyelenggara regulasi, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengevaluasian mengenai kebijakan penghindaran pajak agar tidak disalahgunakan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh penghindaran pajak bagi penelitian selanjutnya, khususnya peneliti yang akan mengembangkan model penelitian serupa.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkhatib, K. (2012). The determinants of leverage of listed companies. *International journal of business and social science*, 3(24).
- Anand, S. (2007). *Essentials of corporate governance*. John Wiley & Sons.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). *Corporate tax avoidance and high-powered incentives*. *Journal of financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Effendi, M. A. (2009). *The power of good corporate governance: teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Effendi, M. A. (2009). The power of good corporate governance: teori dan implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal akuntansi*, 2(1).
- Fatimah, N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal akuntansi*, 10(1).
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26.
- Houston, B., & Brigham, E. F. (2010). Dasar-dasar manajemen keuangan. Salemba Empat, Jakarta.
- Januarita, R. T. P. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia.
- Mansury, R. (2002). Pajak penghasilan lanjutan pasca reformasi 2000. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.

- Merks, P. (2007). *Categorizing international tax Planning. Fundamentals of International Tax Planning*, 66-69.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26, 1-42.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.
- Pohan, H. T. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2), 1077-1089.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77-92.
- Ridho, M. (2016). *Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan sales growth terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rosyada, R. A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014–2016.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019) Factors influencing tax avoidance. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 238-243). Atlantis Press.
- Suwito, Edy., Herawaty, Arleen. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.

Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47-62.

Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

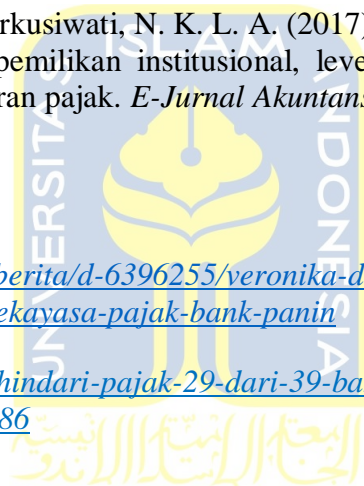
Widyaningsih, N. R., Harimurti, F., & Widarno, B. (2018). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2017). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(3).

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728.

<https://www.idx.co.id/>

<https://news.detik.com/berita/d-6396255/veronika-didakwa-suap-angin-prayitno-rp-25-m-demi-rekayasa-pajak-bank-panin>

<https://news.ddtc.co.id/hindari-pajak-29-dari-39-bank-besar-alihkan-laba-ke-luar-negeri-25186>





Lampiran 1

Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5.	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk
6.	MEGA	Bank Mega Tbk
7.	BNGA	Bank Cimb Niaga Tbk
8.	BNLI	Bank Permata Tbk
9.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
10.	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
11.	NISP	Bank Ocbc Nisp Tbk
12.	BTPN	Bank Btpn Tbk
13.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
14.	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
15.	BTPS	Bank Btpn Syariah Tbk
16.	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk
17.	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
18.	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
19.	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
20.	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
21.	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
22.	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk
23.	BBSI	Bank Krom Bank Indonesia Tbk
24.	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
25.	BINA	Bank Ina Perdana Tbk
26.	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk
27.	MASB	Bank Multiarta Sentosa Tbk
28.	BGTG	Bank Ganesha Tbk

Lampiran 2

Data Perhitungan Variabel Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Tahun	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	BBCA	2017	5,837,593	29,158,743	0.200200434
2	BBRI	2017	7,881,495	36,350,730	0.216818067
3	BMRI	2017	5,713,821	27,156,863	0.210400627
4	BBNI	2017	3,394,795	17,165,387	0.197769791
5	BRIS	2017	49,866	150,957	0.330332479
6	MEGA	2017	349,116	1,649,159	0.211693354
7	BNGA	2017	1,177,282	4,155,020	0.283339671
8	BNLI	2017	202,699	951,132	0.213113427
9	BDMN	2017	1,493,670	4,887,470	0.305612106
10	PNBN	2017	955,016	2,963,453	0.322264601
11	NISP	2017	701,830	2,877,654	0.243889641
12	BTPN	2017	514,905	1,936,845	0.265847293
13	BBTN	2017	834,089	3,861,555	0.215998218
14	BNII	2017	658,845	2,519,690	0.261478595
15	BTPS	2017	238,516	908,698	0.262481044
16	BJBR	2017	420,560	1,631,965	0.257701605
17	BJTM	2017	477,571	1,636,941	0.291746007
18	BBMD	2017	89,332,366,019	353,573,133,007	0.252655979
19	MAYA	2017	234,741	910,146	0.257915763
20	SDRA	2017	156,767	595,492	0.263256265
21	MCOR	2017	25,418	75,317	0.33748025
22	BACA	2017	28,598	114,738	0.249246109
23	BBSI	2017	6,373,672,251	25,406,724,189	0.250865566
24	BNBA	2017	32,831,577,535	122,379,673,005	0.268276395
25	BINA	2017	5,866	24,206	0.242336611
26	BMAS	2017	23,663,171	93,160,363	0.25400471
27	MASB	2017	36,664,509,699	143,831,598,743	0.254912759
28	BGTG	2017	16,681	67,821	0.245956267
29	BBCA	2018	6,854,404	32,706,064	0.209575937
30	BBRI	2018	9,335,208	41,753,694	0.223578014
31	BMRI	2018	8,091,432	33,943,369	0.238380345
32	BBNI	2018	4,728,952	19,820,715	0.238586348

No	Kode Perusahaan	Tahun	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
33	BRIS	2018	44,914	151,514	0.296434653
34	MEGA	2018	402,674	2,002,021	0.201133754
35	BNGA	2018	1,368,390	4,850,818	0.28209469
36	BNLI	2018	317,975	1,219,227	0.260800491
37	BDMN	2018	1,354,328	4,925,686	0.274952159
38	PNBN	2018	1,385,622	4,572,779	0.3030153
39	NISP	2018	847,770	3,485,834	0.243204352
40	BTPN	2018	791,364	3,049,248	0.259527595
41	BBTN	2018	802,352	3,610,275	0.222241242
42	BNII	2018	773,332	3,035,577	0.25475618
43	BTPS	2018	333,708	1,299,019	0.256892316
44	BJBR	2018	384,648	1,937,044	0.198574736
45	BJTM	2018	493,390	1,753,698	0.281342626
46	BBMD	2018	89,686,726,342	355,549,291,067	0.252248362
47	MAYA	2018	163,518	600,930	0.272108232
48	SDRA	2018	196,752	734,723	0.267790718
49	MCOR	2018	45,758	135,618	0.337403589
50	BACA	2018	35,573	142,073	0.250385365
51	BBSI	2018	8,309,968,981	33,093,211,056	0.251107968
52	BNBA	2018	33,624,681,268	126,522,545,756	0.265760391
53	BINA	2018	5,540	16,935	0.327133156
54	BMAS	2018	24,200,444	95,214,310	0.254168139
55	MASB	2018	49,840,135,010	196,039,382,390	0.254235319
56	BGTG	2018	1,813	7,413	0.244570349
57	BBCA	2019	7,719,024	36,288,998	0.212709758
58	BBRI	2019	8,950,228	43,364,053	0.206397405
59	BMRI	2019	7,985,848	36,441,440	0.219141944
60	BBNI	2019	3,860,523	19,369,106	0.199313432
61	BRIS	2019	42,849	116,865	0.366653831
62	MEGA	2019	505,678	2,508,411	0.201592961
63	BNGA	2019	1,310,962	4,953,897	0.26463247
64	BNLI	2019	510,315	2,010,735	0.253795254
65	BDMN	2019	1,619,447	5,487,790	0.295100031
66	PNBN	2019	1,097,318	4,595,617	0.238774902
67	NISP	2019	952,196	3,891,439	0.244689946
68	BTPN	2019	1,026,504	4,018,922	0.255417746
69	BBTN	2019	201,799	411,062	0.490921078

No	Kode Perusahaan	Tahun	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
70	BNII	2019	674,914	2,599,094	0.259672794
71	BTPS	2019	478,615	1,878,249	0.254819782
72	BJBR	2019	413,470	1,977,962	0.209038394
73	BJTM	2019	487,628	1,864,133	0.26158434
74	BBMD	2019	83,199,865,014	330,773,591,197	0.25153116
75	MAYA	2019	186,574	714,688	0.261056573
76	SDRA	2019	173,075	672,866	0.257220606
77	MCOR	2019	33,369	112,336	0.297046361
78	BACA	2019	8,065	23,951	0.336729155
79	BBSI	2019	7,434,309,204	29,696,110,533	0.250346226
80	BNBA	2019	19,661,223,265	70,829,124,380	0.277586705
81	BINA	2019	2,825	9,940	0.284205231
82	BMAS	2019	20,693,447	80,440,261	0.25725236
83	MASB	2019	40,969,105,311	158,880,247,217	0.257861541
84	BGTG	2019	2,685	14,526	0.184840975
85	BBCA	2020	6,421,398	33,568,507	0.191292332
86	BBRI	2020	8,951,971	29,993,406	0.298464636
87	BMRI	2020	5,652,417	23,298,041	0.242613403
88	BBNI	2020	1,790,711	5,112,153	0.350285095
89	BRIS	2020	157,177	405,231	0.387870128
90	MEGA	2020	706,742	3,715,053	0.190237394
91	BNGA	2020	893,762	2,724,725	0.328019158
92	BNLI	2020	893,762	1,615,349	0.553293437
93	BDMN	2020	978,134	2,067,076	0.473196922
94	PNBN	2020	947,587	4,071,792	0.232719893
95	NISP	2020	683,184	2,784,855	0.245321211
96	BTPN	2020	627,399	2,633,076	0.23827607
97	BBTN	2020	668,499	2,270,857	0.294381813
98	BNII	2020	534,253	1,818,645	0.293764314
99	BTPS	2020	269,682	1,124,296	0.239867437
100	BJBR	2020	478,032	2,168,028	0.220491617
101	BJTM	2020	18,406	1,507,369	0.01221068
102	BBMD	2020	94,044,062,672	419,976,181,196	0.223927134
103	MAYA	2020	40,284	104,448	0.385684743
104	SDRA	2020	156,053	692,054	0.225492519
105	MCOR	2020	13,724	63,703	0.215437264
106	BACA	2020	17,545	78,959	0.222203929

No	Kode Perusahaan	Tahun	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
107	BBSI	2020	9,940,438,201	45,116,026,336	0.220330535
108	BNBA	2020	18,418,025,020	53,471,358,172	0.344446553
109	BINA	2020	9,245	28,621	0.32301457
110	BMAS	2020	22,568,224	89,554,695	0.252004923
111	MASB	2020	51,026,684,539	159,218,340,679	0.320482454
112	BGTG	2020	1,804	5,002	0.360655738
113	BBCA	2021	6,859,896	38,272,666	0.179237475
114	BBRI	2021	7,835,608	40,992,065	0.191149385
115	BMRI	2021	7,807,324	38,358,421	0.203536115
116	BBNI	2021	1,573,936	12,550,987	0.125403365
117	BRIS	2021	932,319	4,062,208	0.229510404
118	MEGA	2021	944,565	4,952,616	0.190720419
119	BNGA	2021	1,024,132	4,933,608	0.207582767
120	BNLI	2021	334,394	1,565,521	0.213599179
121	BDMN	2021	613,092	2,280,779	0.268808157
122	PNBN	2021	697,360	2,514,336	0.277353544
123	NISP	2021	684,173	3,203,792	0.213551005
124	BTPN	2021	902,957	4,007,172	0.225335224
125	BBTN	2021	617,093	2,993,320	0.206156709
126	BNII	2021	495,762	2,175,516	0.227882489
127	BTPS	2021	412,468	1,877,473	0.219693173
128	BJBR	2021	568,928	2,587,582	0.219868588
129	BJTM	2021	414,904	1,937,974	0.214091624
130	BBMD	2021	145,993,059,576	665,573,085,996	0.219349404
131	MAYA	2021	28,084	72,211	0.388915816
132	SDRA	2021	191,482	820,650	0.233329678
133	MCOR	2021	24,622	104,014	0.236718134
134	BACA	2021	13,909	48,694	0.285640941
135	BBSI	2021	18,917,558,074	84,636,012,510	0.223516651
136	BNBA	2021	14,122,887,916	56,797,933,783	0.248651438
137	BINA	2021	10,429	50,177	0.207844231
138	BMAS	2021	21,379,963	101,542,031	0.21055284
139	MASB	2021	59,224,949,816	272,354,121,974	0.217455676
140	BGTG	2021	3,785	14,651	0.25834414
141	BBCA	2022	9,026,842	48,996,242	0.184235395
142	BBRI	2022	13,188,494	64,596,701	0.20416668
143	BMRI	2022	11,425,358	56,377,726	0.202657305

No	Kode Perusahaan	Tahun	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
144	BBNI	2022	4,204,928	22,686,708	0.185347649
145	BRIS	2022	1,254,621	5,656,208	0.221813095
146	MEGA	2022	975,392	5,028,070	0.193989344
147	BNGA	2022	1,391,495	6,177,898	0.225237613
148	BNLI	2022	600,600	2,614,013	0.229761673
149	BDMN	2022	975,000	4,404,634	0.221357779
150	PNBN	2022	815,883	4,088,893	0.199536403
151	NISP	2022	891,086	4,218,016	0.211257141
152	BTPN	2022	1,027,755	4,657,319	0.220675243
153	BBTN	2022	830,617	3,875,690	0.214314612
154	BNII	2022	507,015	2,040,226	0.248509234
155	BTPS	2022	502,814	2,282,394	0.22030114
156	BJBR	2022	590,336	2,835,618	0.208186011
157	BJTM	2022	487,225	2,030,049	0.240006522
158	BBMD	2022	147,331,000,605	670,434,882,830	0.219754378
159	MAYA	2022	27,790	53,787	0.516667596
160	SDRA	2022	252,884	1,113,455	0.227116498
161	MCOR	2022	39,783	175,742	0.226371613
162	BACA	2022	9,315	41,444	0.224761123
163	BBSI	2022	21,796,796,167	96,609,202,763	0.225618218
164	BNBA	2022	11,426,769,268	50,365,811,993	0.22687551
165	BINA	2022	45,805	202,853	0.225803907
166	BMAS	2022	36,129,122	151,070,086	0.239154706
167	MASB	2022	89,624,797,570	394,227,036,089	0.227343103
168	BGTG	2022	11,381	57,424	0.198192393

Lampiran 3

Data Perhitungan Variabel Ukuran Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Aset	LN (Size)
1	BBCA	2017	750,319,671,000,000	34.25152046
2	BBRI	2017	1,076,438,066,000,000	34.6124339
3	BMRI	2017	1,124,700,847,000,000	34.65629348
4	BBNI	2017	709,330,084,000,000	34.1953421
5	BRIS	2017	31,543,384,000,000	31.08238498
6	MEGA	2017	82,297,010,000,000	32.04135589
7	BNGA	2017	266,305,445,000,000	33.21566506
8	BNLI	2017	148,328,370,000,000	32.63044965
9	BDMN	2017	178,257,092,000,000	32.81424796
10	PNBN	2017	213,541,797,000,000	32.9948537
11	NISP	2017	153,773,957,000,000	32.66650483
12	BTPN	2017	95,489,850,000,000	32.19004108
13	BBTN	2017	261,365,267,000,000	33.19694004
14	BNII	2017	173,253,491,000,000	32.7857769
15	BTPS	2017	9,156,522,000,000	29.84548753
16	BJBR	2017	114,980,168,000,000	32.37578078
17	BJTM	2017	51,518,681,000,000	31.5729656
18	BBMD	2017	11,817,844,456,356	30.10063175
19	MAYA	2017	74,745,570,000,000	31.94511106
20	SDRA	2017	27,086,504,000,000	30.93005671
21	MCOR	2017	15,788,738,000,000	30.39031802
22	BACA	2017	16,349,473,000,000	30.42521678
23	BBSI	2017	788,268,959,301	27.39310519
24	BNBA	2017	7,014,677,335,611	29.57902583
25	BINA	2017	3,123,345,000,000	28.76992566
26	BMAS	2017	6,054,845,282,000	29.43187994
27	MASB	2017	10,661,843,725,951	29.99769248
28	BGTG	2017	4,581,932,000,000	29.15314186
29	BBCA	2018	824,787,944,000,000	34.34614743
30	BBRI	2018	1,296,898,292,000,000	34.79875188
31	BMRI	2018	1,202,252,094,000,000	34.72297294
32	BBNI	2018	808,572,011,000,000	34.32629086

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Aset	LN (Size)
33	BRIS	2018	37,915,084,000,000	31.26637014
34	MEGA	2018	83,761,946,000,000	32.05899992
35	BNGA	2018	266,781,498,000,000	33.21745108
36	BNLI	2018	152,892,866,000,000	32.66075857
37	BDMN	2018	186,762,189,000,000	32.86085721
38	PNBN	2018	207,204,418,000,000	32.96472695
39	NISP	2018	173,582,894,000,000	32.78767638
40	BTPN	2018	101,919,301,000,000	32.25520245
41	BBTN	2018	306,436,194,000,000	33.35603067
42	BNII	2018	177,532,858,000,000	32.81017682
43	BTPS	2018	12,039,275,000,000	30.11919534
44	BJBR	2018	120,191,387,000,000	32.42010648
45	BJTM	2018	62,689,118,000,000	31.76920899
46	BBMD	2018	12,093,079,368,934	30.12365445
47	MAYA	2018	86,971,893,000,000	32.09660611
48	SDRA	2018	29,631,693,000,000	31.01986561
49	MCOR	2018	15,992,475,000,000	30.40313942
50	BACA	2018	18,019,614,000,000	30.52248195
51	BBSI	2018	866,345,889,327	27.48755008
52	BNBA	2018	7,297,273,467,260	29.6185219
53	BINA	2018	3,854,174,000,000	28.98017783
54	BMAS	2018	6,694,023,677,000	29.53223626
55	MASB	2018	11,130,227,434,653	30.04068572
56	BGTG	2018	4,497,122,000,000	29.13445875
57	BBCA	2019	918,989,312,000,000	34.45429561
58	BBRI	2019	1,416,758,840,000,000	34.88714815
59	BMRI	2019	1,318,246,335,000,000	34.81507871
60	BBNI	2019	845,605,208,000,000	34.37107371
61	BRIS	2019	43,123,488,000,000	31.39508893
62	MEGA	2019	100,803,831,000,000	32.24419748
63	BNGA	2019	274,467,227,000,000	33.24585298
64	BNLI	2019	161,451,259,000,000	32.71522441
65	BDMN	2019	193,533,970,000,000	32.89647417
66	PNBN	2019	211,287,370,000,000	32.98424027
67	NISP	2019	180,706,987,000,000	32.82789798
68	BTPN	2019	181,631,385,000,000	32.83300039
69	BBTN	2019	311,776,828,000,000	33.37330875

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Aset	LN (Size)
70	BNII	2019	169,082,830,000,000	32.76140983
71	BTPS	2019	15,383,038,000,000	30.36428659
72	BJBR	2019	123,536,474,000,000	32.44755756
73	BJTM	2019	76,756,313,000,000	31.97165675
74	BBMD	2019	12,900,218,775,263	30.18826539
75	MAYA	2019	93,408,831,000,000	32.16800701
76	SDRA	2019	36,940,436,000,000	31.24032789
77	MCOR	2019	18,893,684,000,000	30.5698488
78	BACA	2019	18,959,622,000,000	30.57333268
79	BBSI	2019	953,737,479,075	27.58365429
80	BNBA	2019	7,607,653,715,376	29.66017592
81	BINA	2019	5,262,429,000,000	29.29161382
82	BMAS	2019	7,569,580,138,000	29.65515872
83	MASB	2019	14,412,875,999,590	30.29914309
84	BGTG	2019	4,809,743,000,000	29.20166477
85	BBCA	2020	1,075,570,256,000,000	34.61162739
86	BBRI	2020	1,610,065,344,000,000	35.01505116
87	BMRI	2020	1,429,334,484,000,000	34.89598534
88	BBNI	2020	891,337,425,000,000	34.42374418
89	BRIS	2020	57,715,586,000,000	31.68654837
90	MEGA	2020	112,202,653,000,000	32.35132775
91	BNGA	2020	278,674,061,000,000	33.26106397
92	BNLI	2020	197,726,097,000,000	32.91790384
93	BDMN	2020	200,890,068,000,000	32.93377895
94	PNBN	2020	218,067,091,000,000	33.01582389
95	NISP	2020	206,297,200,000,000	32.96033896
96	BTPN	2020	183,165,978,000,000	32.84141384
97	BBTN	2020	361,208,406,000,000	33.52047621
98	BNII	2020	173,224,412,000,000	32.78560905
99	BTPS	2020	16,435,005,000,000	30.43043463
100	BJBR	2020	140,934,002,000,000	32.57931283
101	BJTM	2020	83,619,452,000,000	32.05729729
102	BBMD	2020	14,159,755,232,533	30.28142492
103	MAYA	2020	92,518,025,000,000	32.15842461
104	SDRA	2020	38,053,939,000,000	31.27002572
105	MCOR	2020	25,235,573,000,000	30.85927574
106	BACA	2020	20,223,558,000,000	30.63786928

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Aset	LN (Size)
107	BBSI	2020	1,441,234,275,187	27.996521
108	BNBA	2020	7,637,524,325,854	29.66409463
109	BINA	2020	8,437,685,000,000	29.7637291
110	BMAS	2020	10,110,519,691,000	29.94459755
111	MASB	2020	21,537,936,008,109	30.70083696
112	BGTG	2020	5,365,456,000,000	29.31100248
113	BBCA	2021	1,205,491,799,000,000	34.72566401
114	BBRI	2021	1,678,097,734,000,000	35.05643725
115	BMRI	2021	1,725,611,128,000,000	35.08435766
116	BBNI	2021	964,837,692,000,000	34.50298101
117	BRIS	2021	265,289,081,000,000	33.21184122
118	MEGA	2021	132,879,390,000,000	32.52046299
119	BNGA	2021	307,243,611,000,000	33.35866207
120	BNLI	2021	234,379,042,000,000	33.08796076
121	BDMN	2021	192,207,461,000,000	32.88959643
122	PNBN	2021	204,462,542,000,000	32.95140591
123	NISP	2021	214,395,608,000,000	32.99884406
124	BTPN	2021	191,917,794,000,000	32.88808824
125	BBTN	2021	371,868,311,000,000	33.5495609
126	BNII	2021	168,758,476,000,000	32.75948967
127	BTPS	2021	18,543,856,000,000	30.55115964
128	BJBR	2021	158,356,097,000,000	32.69586739
129	BJTM	2021	100,723,330,000,000	32.24339857
130	BBMD	2021	15,983,152,301,240	30.4025563
131	MAYA	2021	119,104,185,000,000	32.41101973
132	SDRA	2021	43,801,571,000,000	31.4106908
133	MCOR	2021	26,194,548,000,000	30.89657241
134	BACA	2021	22,325,883,000,000	30.73676779
135	BBSI	2021	2,477,550,078,760	28.53829132
136	BNBA	2021	8,664,310,151,340	29.79023342
137	BINA	2021	15,055,850,000,000	30.34278774
138	BMAS	2021	14,234,358,584,000	30.28667978
139	MASB	2021	23,203,123,481,350	30.77530802
140	BGTG	2021	8,575,950,000,000	29.77998289
141	BBCA	2022	1,283,366,355,000,000	34.78826299
142	BBRI	2022	1,865,639,010,000,000	35.16238002
143	BMRI	2022	1,992,544,687,000,000	35.22818895

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Aset	LN (Size)
144	BBNI	2022	1,029,836,868,000,000	34.5681768
145	BRIS	2022	305,727,438,000,000	33.3537151
146	MEGA	2022	141,750,449,000,000	32.58508923
147	BNGA	2022	301,515,827,000,000	33.33984362
148	BNLI	2022	255,112,471,000,000	33.17272563
149	BDMN	2022	197,729,688,000,000	32.917922
150	PNBN	2022	212,431,881,000,000	32.98964249
151	NISP	2022	238,498,560,000,000	33.10538439
152	BTPN	2022	209,169,704,000,000	32.97416702
153	BBTN	2022	402,148,312,000,000	33.62784207
154	BNII	2022	160,813,918,000,000	32.71126902
155	BTPS	2022	21,161,976,000,000	30.6832271
156	BJBR	2022	181,241,291,000,000	32.83085036
157	BJTM	2022	103,031,367,000,000	32.26605459
158	BBMD	2022	16,583,990,927,531	30.43945894
159	MAYA	2022	135,382,812,000,000	32.53912753
160	SDRA	2022	51,499,424,000,000	31.57259174
161	MCOR	2022	25,022,953,000,000	30.85081464
162	BACA	2022	20,628,501,000,000	30.65769478
163	BBSI	2022	3,313,589,745,696	28.82905323
164	BNBA	2022	8,211,291,790,399	29.73653137
165	BINA	2022	20,552,736,000,000	30.65401519
166	BMAS	2022	14,956,302,274,000	30.33615388
167	MASB	2022	21,271,327,194,429	30.68838114
168	BGTG	2022	8,968,132,000,000	29.82469852

Lampiran 4

Data Perhitungan Variabel Komite Audit

No	Kode Perusahaan	Komite Audit					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BBCA	3	3	3	3	3	3
2	BBRI	6	6	7	8	8	7
3	BMRI	6	6	7	7	7	7
4	BBNI	4	4	4	5	5	5
5	BRIS	5	6	5	4	8	6
6	MEGA	3	3	3	3	3	3
7	BNGA	4	4	4	6	3	5
8	BNLI	3	4	4	4	4	4
9	BDMN	3	4	4	4	5	5
10	PNBN	4	3	3	5	5	5
11	NISP	3	4	4	4	4	3
12	BTPN	4	4	3	4	4	4
13	BBTN	6	6	2	3	5	6
14	BNII	3	3	3	3	5	5
15	BTPS	4	4	4	3	4	4
16	BJBR	4	3	4	4	3	4
17	BJTM	4	4	4	4	4	4
18	BBMD	3	3	3	3	3	3
19	MAYA	3	3	3	3	3	3
20	SDRA	5	4	5	5	4	4
21	MCOR	4	4	3	3	3	3
22	BACA	3	3	3	3	2	2
23	BBSI	3	3	3	3	3	3
24	BNBA	3	3	3	3	3	3
25	BINA	4	4	4	4	3	3
26	BMAS	4	3	4	4	3	3
27	MASB	3	3	3	3	3	3
28	BGTG	3	4	4	4	3	3

Lampiran 5

Data Perhitungan Variabel *Leverage*

No	Kode	Tahun	Total Liabilitas	Total Aset	DAR
1	BBCA	2017	614,940,262	746,341,956	0.823939023
2	BBRI	2017	911,390,859	1,076,438,066	0.846672826
3	BMRI	2017	888,026,817	1,058,032,949	0.839318679
4	BBNI	2017	584,086,818	684,990,122	0.852693782
5	BRIS	2017	9,100,455	11,703,296	0.77759761
6	MEGA	2017	69,232,394	82,297,010	0.841250417
7	BNGA	2017	229,354,449	266,305,445	0.861245811
8	BNLI	2017	126,817,628	148,328,370	0.854978909
9	BDMN	2017	139,084,940	178,257,092	0.780249125
10	PNBN	2017	177,253,066	213,541,797	0.830062632
11	NISP	2017	131,989,603	153,773,957	0.858335219
12	BTPN	2017	73,027,270	90,228,067	0.809363122
13	BBTN	2017	223,937,463	245,600,897	0.911794158
14	BNII	2017	152,478,451	173,253,491	0.880088765
15	BTPS	2017	1,653,828	3,908,474	0.423139056
16	BJBR	2017	98,820,526	108,925,501	0.907230401
17	BJTM	2017	43,702,607	51,518,681	0.848286605
18	BBMD	2017	8,735,206,429,836	11,817,844,456,356	0.739153952
19	MAYA	2017	66,202,194	74,745,570	0.885700571
20	SDRA	2017	20,979,506	27,086,504	0.774537238
21	MCOR	2017	13,344,943	15,788,738	0.845219105
22	BACA	2017	14,941,087	16,349,473	0.913857407
23	BBSI	2017	410,959,281,699	788,268,959,301	0.521343987
24	BNBA	2017	5,651,847,900,990	7,014,677,335,611	0.805717445
25	BINA	2017	1,919,161	3,123,345	0.614456936
26	BMAS	2017	4,892,687,894	6,054,845,282	0.808061588
27	MASB	2017	9,268,365,715,022	10,661,843,725,951	0.869302341
28	BGTG	2017	3,463,572	4,581,932	0.755919555
29	BBCA	2018	668,438,779	820,192,206	0.814978214
30	BBRI	2018	1,090,664,084	1,275,939,415	0.854793003
31	BMRI	2018	941,953,100	1,126,913,405	0.835869993
32	BBNI	2018	671,237,546	781,611,335	0.858786862
33	BRIS	2018	11,894,916	16,921,556	0.702944576

No	Kode	Tahun	Total Liabilitas	Total Aset	DAR
34	MEGA	2018	69,979,273	83,761,946	0.835454241
35	BNGA	2018	227,200,919	266,781,498	0.851636717
36	BNLI	2018	130,440,930	152,892,866	0.853152494
37	BDMN	2018	144,822,368	186,762,189	0.775437302
38	PNBN	2018	166,457,301	207,204,418	0.803348223
39	NISP	2018	149,154,640	173,582,894	0.859270384
40	BTPN	2018	76,544,999	95,909,406	0.798096894
41	BBTN	2018	263,784,017	287,624,465	0.917112586
42	BNII	2018	152,442,167	177,532,858	0.858670157
43	BTPS	2018	2,049,483	6,046,415	0.338958375
44	BJBR	2018	104,035,920	115,321,235	0.902140183
45	BJTM	2018	54,217,182	62,689,118	0.864857949
46	BBMD	2018	9,005,066,283,473	12,093,079,368,934	0.744646257
47	MAYA	2018	76,183,319	86,971,893	0.875953327
48	SDRA	2018	23,081,225	29,631,693	0.7789371
49	MCOR	2018	13,476,317	15,992,475	0.842666129
50	BACA	2018	16,534,651	18,019,614	0.917591853
51	BBSI	2018	464,252,969,650	866,345,889,327	0.535874846
52	BNBA	2018	5,802,518,829,966	7,297,273,467,260	0.795162584
53	BINA	2018	2,646,122	3,854,174	0.686560077
54	BMAS	2018	5,493,283,082	6,694,023,677	0.820624985
55	MASB	2018	9,593,734,123,676	11,130,227,434,653	0.861953107
56	BGTG	2018	3,370,923	4,497,122	0.749573394
57	BBCA	2019	740,067,127	914,210,283	0.809515208
58	BBRI	2019	1,183,155,670	1,391,940,006	0.850004788
59	BMRI	2019	1,025,749,580	1,234,784,105	0.830711681
60	BBNI	2019	688,489,442	813,493,390	0.846336861
61	BRIS	2019	11,880,036	16,968,072	0.700140593
62	MEGA	2019	85,262,393	100,803,831	0.845824927
63	BNGA	2019	231,173,061	274,467,227	0.842261073
64	BNLI	2019	137,413,908	161,451,259	0.85111698
65	BDMN	2019	148,116,943	193,533,970	0.76532788
66	PNBN	2019	166,845,656	211,287,370	0.789662231
67	NISP	2019	153,042,184	180,706,987	0.84690795
68	BTPN	2019	142,608,793	174,080,721	0.819210721
69	BBTN	2019	269,451,682	293,287,877	0.91872765
70	BNII	2019	142,397,914	169,082,830	0.84217844
71	BTPS	2019	2,439,054	7,832,374	0.311406733

No	Kode	Tahun	Total Liabilitas	Total Aset	DAR
72	BJBR	2019	105,920,991	117,963,620	0.897912348
73	BJTM	2019	67,734,755	76,756,313	0.882464938
74	BBMD	2019	9,419,749,653,807	12,900,218,775,263	0.730200768
75	MAYA	2019	81,066,862	93,408,831	0.867871497
76	SDRA	2019	30,004,846	36,940,436	0.812249374
77	MCOR	2019	16,098,826	18,893,684	0.852074482
78	BACA	2019	17,421,982	18,959,622	0.918899227
79	BBSI	2019	452,297,420,963	953,737,479,075	0.474236811
80	BNBA	2019	6,083,998,151,873	7,607,653,715,376	0.7997207
81	BINA	2019	4,041,333	5,262,429	0.767959625
82	BMAS	2019	6,340,648,554	7,569,580,138	0.837648646
83	MASB	2019	12,748,876,497,642	14,412,875,999,590	0.884547713
84	BGTG	2019	3,669,743	4,809,743	0.762981099
85	BBCA	2020	885,537,919	1,070,252,628	0.827410179
86	BBRI	2020	1,347,101,486	1,576,568,368	0.854451677
87	BMRI	2020	1,151,267,847	1,345,063,930	0.855920541
88	BBNI	2020	746,235,663	859,107,862	0.868616964
89	BRIS	2020	17,475,112	22,919,400	0.762459401
90	MEGA	2020	93,994,503	112,202,653	0.83772086
91	BNGA	2020	238,607,269	278,674,061	0.856223461
92	BNLI	2020	162,654,644	197,726,097	0.82262608
93	BDMN	2020	157,314,569	200,890,068	0.783087838
94	PNBN	2020	170,606,759	218,067,091	0.782359036
95	NISP	2020	176,467,884	206,297,200	0.855406103
96	BTPN	2020	142,277,859	175,242,612	0.811890769
97	BBTN	2020	321,376,142	341,363,987	0.941447119
98	BNII	2020	146,000,782	173,224,412	0.842841839
99	BTPS	2020	2,632,890	8,511,639	0.309328203
100	BJBR	2020	122,676,884	134,682,684	0.910858622
101	BJTM	2020	73,614,502	83,619,452	0.880351404
102	BBMD	2020	10,150,492,606,994	14,159,755,232,533	0.71685509
103	MAYA	2020	79,603,549	92,518,025	0.860411244
104	SDRA	2020	30,782,968	38,053,939	0.808929872
105	MCOR	2020	19,218,857	25,235,573	0.761577992
106	BACA	2020	18,583,167	20,223,558	0.918887122
107	BBSI	2020	432,251,684,035	1,441,234,275,188	0.29991771
108	BNBA	2020	6,128,138,202,911	7,637,524,325,854	0.802372332
109	BINA	2020	7,220,541	8,437,685	0.855749059

No	Kode	Tahun	Total Liabilitas	Total Aset	DAR
110	BMAS	2020	8,826,257,598	10,110,519,691	0.872977638
111	MASB	2020	19,648,095,743,949	21,537,936,008,109	0.912255275
112	BGTG	2020	4,226,331	5,365,456	0.787692789
113	BBCA	2021	1,010,780,237	1,205,491,799	0.838479563
114	BBRI	2021	1,386,310,930	1,678,097,734	0.826120495
115	BMRI	2021	1,326,592,237	1,548,703,519	0.856582439
116	BBNI	2021	838,317,715	964,837,692	0.86886916
117	BRIS	2021	61,886,476	86,900,410	0.712154016
118	MEGA	2021	113,734,926	132,879,390	0.855926009
119	BNGA	2021	265,025,889	307,243,611	0.862592026
120	BNLI	2021	197,765,327	234,379,042	0.843784177
121	BDMN	2021	147,010,107	192,207,461	0.764851199
122	PNBN	2021	155,914,795	204,462,542	0.762559212
123	NISP	2021	182,068,037	214,395,608	0.84921533
124	BTPN	2021	146,932,964	183,011,891	0.802860203
125	BBTN	2021	327,693,592	349,100,239	0.938680515
126	BNII	2021	140,033,353	168,758,476	0.829785598
127	BTPS	2021	2,543,053	9,637,953	0.263858207
128	BJBR	2021	137,955,374	151,039,407	0.913373382
129	BJTM	2021	87,947,426	98,857,965	0.889634194
130	BBMD	2021	11,693,332,176,560	15,983,152,301,240	0.731603626
131	MAYA	2021	105,125,905	119,104,185	0.882638213
132	SDRA	2021	34,544,380	43,801,571	0.788656188
133	MCOR	2021	20,113,342	26,194,548	0.767844591
134	BACA	2021	20,203,112	22,325,883	0.904918833
135	BBSI	2021	403,505,741,590	2,477,550,078,760	0.162864818
136	BNBA	2021	6,422,689,306,419	8,664,310,151,340	0.741281094
137	BINA	2021	12,682,175	15,055,850	0.842342013
138	BMAS	2021	12,903,147,645	14,234,358,584	0.906479036
139	MASB	2021	20,502,065,652,524	23,203,123,481,350	0.883590766
140	BGTG	2021	6,427,061	8,575,950	0.74942846
141	BBCA	2022	1,071,152,485	1,283,366,355	0.834642798
142	BBRI	2022	1,562,243,693	1,865,639,010	0.837377266
143	BMRI	2022	1,544,096,631	1,796,342,086	0.859578275
144	BBNI	2022	889,639,206	1,029,836,868	0.863864204
145	BRIS	2022	73,655,791	107,161,401	0.687335088
146	MEGA	2022	121,116,769	141,750,449	0.854436581
147	BNGA	2022	257,751,736	301,515,827	0.854853089

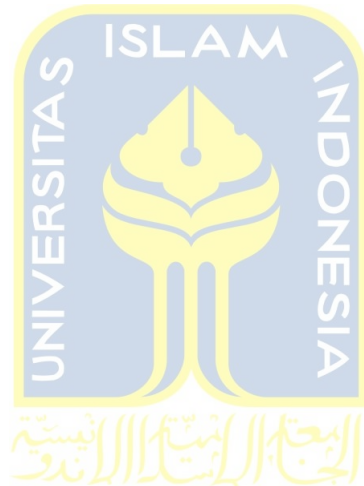
No	Kode	Tahun	Total Liabilitas	Total Aset	DAR
148	BNLI	2022	217,495,182	255,112,471	0.852546256
149	BDMN	2022	150,251,206	197,729,688	0.759881875
150	PNBN	2022	161,715,787	212,431,881	0.761259498
151	NISP	2022	204,287,525	238,498,560	0.856556639
152	BTPN	2022	159,913,419	199,326,443	0.802268964
153	BBTN	2022	351,376,683	377,286,037	0.931327027
154	BNII	2022	131,279,968	160,813,918	0.816347053
155	BTPS	2022	2,910,720	11,318,715	0.257159934
156	BJBR	2022	158,120,881	172,866,867	0.914697442
157	BJTM	2022	89,715,529	101,161,390	0.88685544
158	BBMD	2022	12,031,692,974,122	16,583,990,927,531	0.725500456
159	MAYA	2022	121,526,152	135,382,812	0.897648307
160	SDRA	2022	41,568,671	51,499,424	0.807167688
161	MCOR	2022	18,823,716	25,022,953	0.752257977
162	BACA	2022	17,340,964	20,628,501	0.840631319
163	BBSI	2022	248,248,586,432	3,313,589,745,696	0.074918323
164	BNBA	2022	5,134,517,792,869	8,211,291,790,399	0.625299639
165	BINA	2022	17,264,648	20,552,736	0.840017018
166	BMAS	2022	11,803,688,126	14,956,302,274	0.789211659
167	MASB	2022	17,853,215,580,512	21,271,327,194,429	0.839308964
168	BGTG	2022	5,829,370	8,968,132	0.650009389

UNIVERSITAS
 البعثة الإسلامية الأندلسية

Lampiran 6

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan (X1)	168	27.3931	35.2282	31.9150	1.8104
Komite Audit (X2)	168	2	8	3.92	1.209
Leverage (X3)	168	.0749	.9414	.7922	.1457
Penghindaran Pajak (Y)	168	.0122	.5533	.2521	.0623
Valid N (listwise)	168				



Lampiran 7

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		168
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.60338670
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		1.016
Asymp. Sig. (2-tailed)		.253

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 8

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-14.898	.742		20.087	.000		
	Ukuran Perusahaan (X1)	3.961	.210	.808	18.824	.000	.958	1.044
	Komite Audit (X2)	-.062	.087	-.030	-.717	.475	.984	1.016
	Leverage (X3)	.307	.094	.140	3.274	.001	.960	1.041

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)



Lampiran 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	-1.594	1.477		-1.079	.282
	Ukuran Perusahaan (X1)	.651	.419	.123	1.554	.122
	Komite Audit (X2)	-.153	.173	-.069	-.887	.376
	Leverage (X3)	-.105	.187	-.045	-.565	.573

a. Dependent Variable: ABS_RES



Lampiran 10

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.843 ^a	.710	.705	.60888	1.910

a. Predictors: (Constant), Leverage (X3), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)



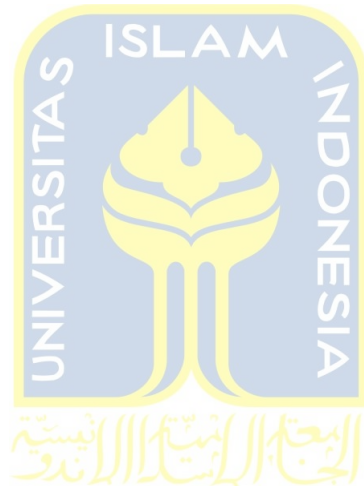
Lampiran 11

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.710	.705	.60888

a. Predictors: (Constant), Leverage (X3), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

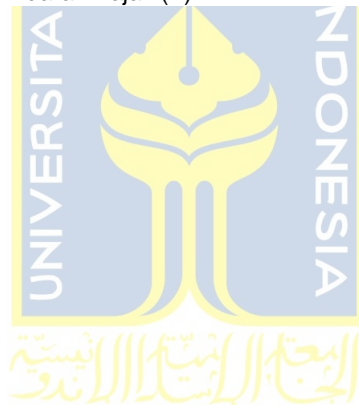


Lampiran 12

Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	-14.898	.742		-20.087	.000
	Ukuran Perusahaan (X1)	3.961	.210	.808	18.824	.000
	Komite Audit (X2)	-.062	.087	-.030	-.717	.475
	Leverage (X3)	.307	.094	.140	3.274	.001

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)



Lampiran 13

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.111	3	49.704	134.068	.000 ^b
	Residual	60.801	164	.371		
	Total	209.912	167			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Leverage (X3), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X1)

